

ABSTRAK

Di negara-negara demokratis yang maju, isu konvergensi media telah mendorong penerapan peraturan mengenai kepemilikan lintas media dengan penekanan pada transparansi dan pengendalian kepemilikan di sektor-sektor yang saling terkait. Media massa memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dengan menyebarluaskan informasi berdasarkan fakta dan data yang relevan bagi publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kebebasan pers adalah hak setiap warga negara. Hal ini menegaskan bahwa lembaga pers bebas mengekspresikan dirinya tanpa takut disensor, dibredel, atau dilarang oleh pemerintah, untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami kriteria kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; kedua, untuk mengeksplorasi mekanisme kontrol terhadap kebebasan pers dalam pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang yang sama. Rumusan masalah penelitian mencakup pertanyaan-pertanyaan: pertama, apa kriteria kebebasan pers menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers? Kedua, bagaimana mekanisme kontrol terhadap kebebasan pers dalam pemberitaan diatur menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers? Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Undang-Undang tersebut mengatur kedua aspek ini untuk memastikan keberlangsungan kebebasan pers yang seimbang dengan tanggung jawab sosialnya dalam menyebarkan informasi.

Kata Kunci: Demokrasi, Konvergensi, Lembaga Pers, Kebebasan Pers.

ABSTRACT

In developed democracies, the issue of media convergence has prompted the implementation of regulations on cross-media ownership with an emphasis on transparency and ownership control in interrelated sectors. Mass media plays an important role in people's lives by disseminating information based on facts and data that are relevant to the public. Law Number 40 of 1999 concerning the Press emphasizes that freedom of the press is the right of every citizen. This confirms that press institutions are free to express themselves without fear of censorship, fines, or prohibitions by the government, to ensure the public's right to accurate and balanced information. The objectives of this study are: first, to understand the criteria for press freedom in accordance with Law Number 40 of 1999 concerning the Press; second, to explore the control mechanism for press freedom in the press in accordance with the same law. The formulation of the research problem includes the following questions: first, what are the criteria for press freedom according to Law No. 40 of 1999 concerning the Press? Second, how is the control mechanism for press freedom in the press regulated according to Law No. 40 of 1999 concerning the Press? In this context, it is important to understand how the Law regulates these two aspects to ensure the sustainability of press freedom that is balanced with its social responsibility in disseminating information..

Keywords: Democracy, Convergence, Press Institutions, Press Freedom.